

PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

Haisa Apriyani¹, Dwikora Harjo^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : haisarambe@gmail.com¹, joni.dwikora@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Tax Digitization, Tax Incentives, Tax Revenue.

The tax revenue data of the KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo over the past few years reflects a downward trend, indicating the impact of limited accessibility and transparency of tax incentive information, as well as the lack of readiness and accessibility to technology among taxpayers, hindering optimal utilization of tax incentives and tax digitization adoption. This study aims to identify and analyze the impact of tax incentives on tax revenue, the impact of tax digitization on tax revenue, and the combined impact of tax incentives and tax digitization on tax revenue at the KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. The research employs a descriptive quantitative method with a population of all corporate taxpayers who filed tax returns in 2022 at the KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, totaling 966 corporate taxpayers. A sample size of 97 respondents was determined based on Arikunto's theory, which suggests sampling 10% of the population. Based on the research findings, it is concluded that Tax Incentives partially influence tax revenue positively by 50.3% at the KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, while Tax Digitization partially influences tax revenue positively by 57.7%. Furthermore, Tax Incentives and Tax Digitization together significantly influence tax revenue positively by 60.8% at the KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. To enhance tax revenue at the KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, it is recommended to improve tax incentives by refining incentive procedures, enhancing communication and transparency, and encouraging active participation of corporate taxpayers in providing accurate data to minimize tax calculation errors.

PENDAHULUAN

Pajak nasional merupakan pilar utama dalam perekonomian suatu negara, memberikan kontribusi vital bagi pendapatan yang mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai tulang punggung pendapatan keuangan dan pembiayaan pengeluaran negara, penerimaan pajak menjadi fokus utama pemerintah setiap tahunnya. Untuk memastikan kelangsungan dan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah harus terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Keberhasilan dalam mengelola penerimaan pajak tidak hanya mencerminkan stabilitas keuangan negara, tetapi juga berdampak luas pada kemampuan negara dalam menyediakan layanan berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai sumber utama pendapatan keuangan negara, penerimaan pajak juga menjadi fondasi penting bagi pembiayaan berbagai kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak senantiasa menjadi prioritas utama pemerintah, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pelaksanaan inisiatif pembangunan serta penyediaan layanan publik yang esensial bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak menjadi aspek vital dalam menjaga keberlanjutan dan kemajuan negara. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, sebagai entitas di tingkat lokal yang bertanggung jawab atas administrasi pajak, memiliki peran sentral dalam menghimpun, mengelola, dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak kepada pemerintah pusat. Namun, mencapai target penerimaan pajak di wilayah ini merupakan tantangan yang tidak mudah. Diperlukan upaya bersama antara KPP, wajib pajak, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pajak, memperbaiki kepatuhan pajak, serta memperbaiki proses administrasi guna mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel data penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo:

Tabel 1 Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo (dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak
2019	Rp. 7,262
2020	Rp. 4,642
2021	Rp. 4,407
2022	Rp. 4,294

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, 2023

Data penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan sebuah tren penurunan yang patut diperhatikan. Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh wajib pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Data Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Tahun	Jumlah WP Badan	Jumlah WP Badan Laporan	Penerimaan Pajak (miliar rupiah)
2019	2.438	1.138	Rp. 7,262
2020	1.371	1.015	Rp. 4,642
2021	938	748	Rp. 4,407
2022	1.036	966	Rp. 4,294

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, 2023

Berdasarkan tabel data Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo memberikan gambaran pada tahun 2019, total 2.438 Wajib Pajak Badan terdaftar di wilayah tersebut, di mana 1.138 di antaranya aktif melaporkan pajak, yang kemudian menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp. 7,262 miliar. Meskipun terjadi penurunan jumlah wajib pajak Badan pada tahun 2020 menjadi 1.371, namun jumlah yang melaporkan pajak tetap tinggi, yaitu sebanyak 1.015, yang menyumbangkan penerimaan pajak sebesar Rp. 4,642 miliar. Pada tahun 2021 dan 2022, terlihat penurunan jumlah Wajib Pajak Badan secara keseluruhan menjadi 938 dan 1.036, sementara jumlah yang melaporkan pajak tetap signifikan, yaitu 748 dan 966, dengan penerimaan pajak masing-masing mencapai Rp. 4,407 miliar dan Rp. 4,294 miliar (Sumber: KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, 2023). Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo mengalami tantangan dalam mencapai target penerimaan pajak. Adanya fluktuasi dalam jumlah wajib pajak badan dan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan pajak selama empat tahun terakhir. Meskipun ada fluktuasi dalam jumlah wajib pajak badan yang melaporkan pajak, penerimaan pajak tetap mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dihadapkan pada tantangan yang

signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta memastikan pencapaian target penerimaan pajak. Diperlukan upaya lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran pajak, memperbaiki proses administrasi, dan memanfaatkan insentif pajak secara optimal guna mengembalikan tren positif dalam penerimaan pajak di masa mendatang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ermanis, Putri, & Lawita, 2021) menegaskan bahwa insentif pajak dan digitalisasi pajak adalah dua komponen kunci yang telah menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Variabel Insentif Pajak selama pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan, dan Implementasi Omnibus Law Perpajakan memiliki dampak positif terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan selama periode tahun 2020 – 2021. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan insentif pajak dan menerapkan teknologi digital dalam administrasi perpajakan menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia telah memberikan sejumlah insentif pajak kepada wajib pajak yang memenuhi syarat, seperti potongan pajak atau keringanan pajak. Tujuan dari insentif ini adalah untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh dan mematuhi kewajiban perpajakan (Harjo, et al., 2023, p. 6) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan berbagai macam insentif pajak kepada masyarakat di berbagai lapisan selama tahun 2024. Insentif tersebut mencakup kebijakan gratis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keringanan Pajak Penghasilan (PPh), dan fasilitas 'libur' pajak.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, manfaat dari insentif perpajakan telah secara signifikan meningkatkan daya beli, mendukung likuiditas, dan memperkuat kelangsungan usaha, sebagaimana diungkapkan dalam laman resmi Kementerian Keuangan pada tahun 2021. Survei menunjukkan bahwa mayoritas Wajib Pajak yang paling terdampak pandemi telah memanfaatkan insentif perpajakan, dengan sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi menjadi yang paling terdampak (<https://pen.kemenkeu.go.id/>) Pada tahun 2022, UMKM menerima manfaat sebesar Rp69,7 triliun, setara dengan 21,5 persen dari total pengeluaran perpajakan, dengan tujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendorong pertumbuhan UMKM. Selain itu, untuk mendukung iklim investasi dan dunia bisnis, Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas, termasuk libur pajak, pengurangan pajak, dan penurunan tarif PPh untuk perusahaan terbuka pada tahun 2022, dengan nilai masing-masing sebesar Rp4,7 triliun, Rp416 miliar, dan Rp8,0 triliun (Sumber: Kementerian Keuangan, 2023). Sementara di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo pada tahun 2022, teridentifikasi sebanyak 748 wajib pajak Badan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan dari jumlah tersebut, hanya sekitar 21% yang secara efektif mengambil manfaat dari insentif pajak. KPP Pratama Pasar Rebo memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan pajak, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah rendahnya pemanfaatan Insentif Pajak. Meskipun pemerintah telah menghadirkan berbagai insentif pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, implementasinya belum optimal di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak tentang insentif yang tersedia, serta kendala birokrasi yang mungkin menghambat proses klaim insentif pajak.

Selain insentif perpajakan, peran digitalisasi pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan. "Modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital yang telah diterapkan oleh DJP sebagai lembaga pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, dan menjaga integritas lembaga pajak, dengan tujuan utama untuk memperkuat kepercayaan masyarakat" (Hernando & Wahyudin, 2020). Sistem digitalisasi pajak yang efektif dapat mempermudah proses perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, dan menjaga integritas lembaga pajak. Modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital yang diterapkan

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, terutama selama pandemi Covid-19 dengan adanya aturan pembatasan kerja dari rumah. Revolusi industri 4.0 memperkenalkan otomatisasi dan integrasi layanan perpajakan, memungkinkan pelaporan kewajiban pajak dari rumah atau kantor tanpa mengganggu pekerjaan rutin, serta memfasilitasi seluruh proses perpajakan dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT secara daring. Namun, meskipun digitalisasi pajak memberikan kemudahan, masih terdapat kendala mendasar yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo seperti rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap teknologi, sulitnya penggunaan aplikasi pajak, dan stabilitas server yang belum optimal, menyebabkan keterlambatan pelaporan. Jika digitalisasi pajak belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, hal ini dapat menghambat pemungutan pajak yang efisien. Oleh karena itu, penting bagi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo untuk terus meningkatkan digitalisasi pajak serta memberikan pelatihan kepada wajib pajak agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal.

Penelitian ini memiliki relevansi yang sangat penting karena fokusnya pada evaluasi khusus terhadap penerapan insentif pajak dan digitalisasi pajak. Hal ini penting untuk mengevaluasi secara khusus bagaimana insentif pajak dan digitalisasi pajak dapat diterapkan dengan efektif di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan penelitian ini, peneliti dapat memperoleh wawasan lebih mendalam tentang dampak konkret dari kebijakan dan praktik pajak tersebut, sehingga dapat memberikan panduan yang lebih kuat untuk perbaikan sistem perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak di tingkat lokal.

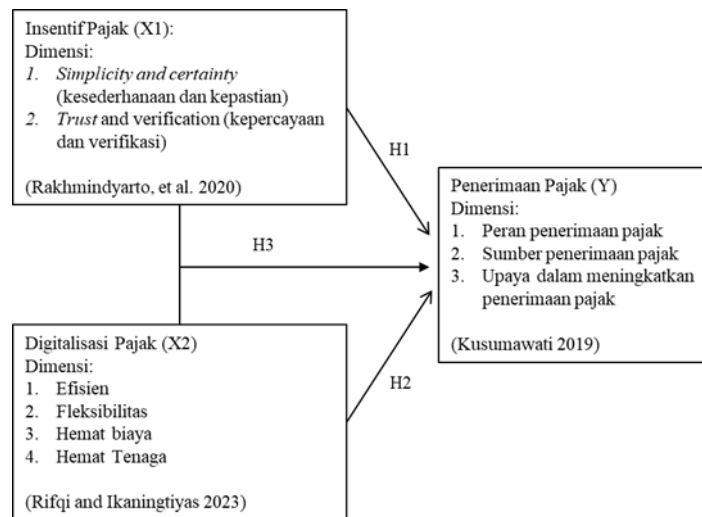
KAJIAN PUSTAKA

1. **Insentif Pajak** : Menurut (Rakhmindyarto, et al., 2020, p. 2), “insentif pajak disebut sebagai pengeluaran pemerintah tidak langsung karena melalui insentif pajak pemerintah tidak langsung mengeluarkan uang, melainkan tidak menerima apa yang seharusnya menjadi penerimaan negara” Menurut (Kusumo, 2022, p. 33) “kebijakan insentif pajak berupa relaksasi pajak yang menghilangkan denda atas keterlambatan pembayaran pajak”.
2. **Digitalisasi Pajak** : Menurut (Muvidah & Andriani, 2022, p. 5088) “digitalisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari upaya reformasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajaknya. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki dampak positif dan berarti dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak oleh individu wajib pajak.” Sementara menurut (Rifqi & Ikaningtiyas, 2023, p. 157) “digitalisasi adalah proses perubahan media dari bentuk cetak ke bentuk elektronik.” Digitalisasi merupakan transformasi media dari format cetak ke format elektronik. Dalam konteks administrasi perpajakan, digitalisasi merupakan bagian penting dari upaya reformasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan penerimaan pajak. Adopsi sistem administrasi perpajakan yang modern tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak oleh para wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.
3. **Penerimaan Pajak** : Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh (Pohan, 2017, p. 233), “penerimaan pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang menjadi tulang punggung utama dalam pembiayaan APBN yang memiliki peran yang sangat dominan” Sementara (Kusumawati, 2019) mengemukakan bahwa “penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai

kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat” Simpulannya, penerimaan pajak memiliki peran dominan sebagai sumber utama pendapatan dalam pembiayaan APBN yang secara terus-menerus menyediakan sumber pendapatan yang dapat dikelola dan dikembangkan sesuai kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, gambaran lengkap mengenai pengaruh kebijakan insentif pajak dan digitalisasi pajak terhadap penerimaan pajak, yang menjadi kerangka teori penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan memberikan deskripsi dan gambaran data yang ada tanpa melakukan interpretasi mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan data sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan beragam teknik pengumpulan data yang sesuai dan relevan, antara lain kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dengan pertanyaan tertutup, memastikan pengumpulan data yang terstruktur. Sementara itu, teknik dokumentasi melibatkan analisis dokumen tertulis, gambar, dan materi elektronik untuk menyusun hasil kajian yang sistematis. Studi pustaka dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik random sampling. Populasi yang diambil adalah seluruh wajib pajak Badan yang melaporkan SPT pada tahun 2022 di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, sebanyak 966 wajib pajak Badan. Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti mengacu pada teori (Arikunto, 2019, p. 112) yang menyatakan bahwa jika populasi kurang dari 100, sampel harus terdiri dari seluruh populasi, sedangkan jika lebih dari 100, ukuran sampel harus sekitar 10%-15% atau 20%-25% dari populasi. Dalam penelitian ini, populasi sejumlah 966 orang, sehingga peneliti memilih mengambil sampel sebanyak 10% dari populasi, yaitu sebanyak 97 responden. Jumlah responden ini dianggap cukup representatif untuk mencerminkan keadaan populasi yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI VALIDITAS

Uji validitas instrumen dilakukan terhadap 97 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Data dari kuesioner tersebut diolah menggunakan SPSS versi 25. Dengan tingkat signifikansi 0,05 dan jumlah responden 97 orang, nilai dari r tabel adalah 0.1996 berdasarkan rumus $n-2$. Jika korelasi antara indikator dan skor total bernilai $r \geq 0.1996$, maka indikator tersebut dianggap valid. Sebaliknya, jika korelasi indikator dengan skor total kurang dari 0.1996, maka indikator tersebut dianggap tidak valid.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel Penelitian	Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Hasil
Insentif Pajak (X1)	Pernyataan 1	.695**	0.1996	Valid
	Pernyataan 2	.652**	0.1996	Valid
	Pernyataan 3	.842**	0.1996	Valid
	Pernyataan 4	.781**	0.1996	Valid
	Pernyataan 5	.679**	0.1996	Valid
	Pernyataan 6	.746**	0.1996	Valid
Digitalisasi Pajak (X2)	Pernyataan 1	.742**	0.1996	Valid
	Pernyataan 2	.675**	0.1996	Valid
	Pernyataan 3	.760**	0.1996	Valid
	Pernyataan 4	.741**	0.1996	Valid
	Pernyataan 5	.747**	0.1996	Valid
	Pernyataan 6	.680**	0.1996	Valid
	Pernyataan 7	.760**	0.1996	Valid
	Pernyataan 8	.665**	0.1996	Valid
	Pernyataan 9	.719**	0.1996	Valid
	Pernyataan 10	.570**	0.1996	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	Pernyataan 1	.726**	0.1996	Valid
	Pernyataan 2	.661**	0.1996	Valid
	Pernyataan 3	.777**	0.1996	Valid
	Pernyataan 4	.782**	0.1996	Valid
	Pernyataan 5	.759**	0.1996	Valid
	Pernyataan 6	.705**	0.1996	Valid
	Pernyataan 7	.650**	0.1996	Valid

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Hal ini mengindikasikan bahwa semua item pada variabel independen dan dependen telah memenuhi persyaratan validitas, yaitu bahwa nilai r hitung melebihi nilai r tabel. Dengan demikian, indikator penelitian ini dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian dan dianggap valid.

UJI RELIABILITAS

Reliabilitas dari pertanyaan angket yang telah diajukan peneliti kepada responden dalam penelitian ini akan terlihat pada tabel Reliability Statistics yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Baku	Hasil
Insentif Pajak (X1)	0.828	0,6	Reliabel
Digitalisasi Pajak (X2)	0.888	0,6	Reliabel

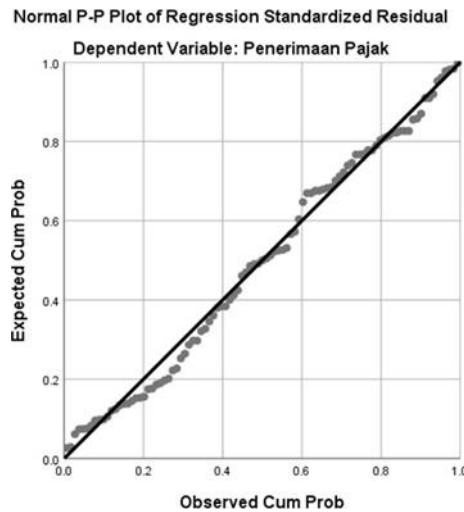
Penerimaan Pajak (Y)	0.847	0,6	Reliabel
----------------------	-------	-----	----------

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel Insentif Pajak (X1), Digitalisasi Pajak (X2) dan Penerimaan Pajak (Y) lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang telah disajikan kepada responden adalah reliabel.

UJI NORMALITAS

Berikut adalah hasil uji normalitas dengan SPSS 25:



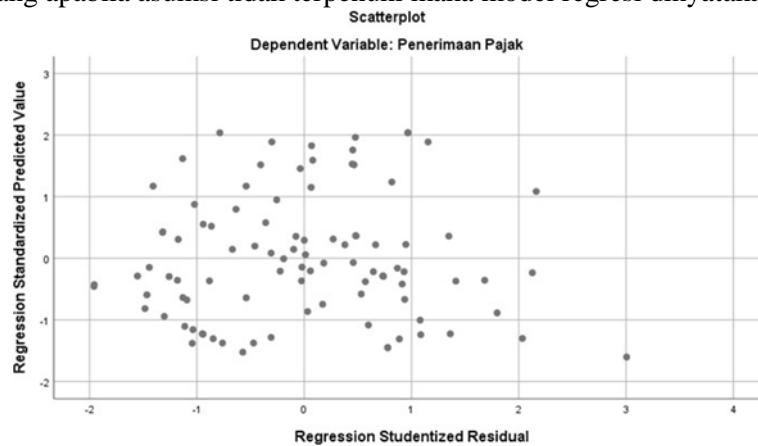
Gambar 2 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Dari gambar di atas, terlihat bahwa data tersebar sekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis diagonal, menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

UJI HETEROKEDASTISITAS

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan residual dalam model regresi, yang apabila asumsi tidak terpenuhi maka model regresi dinyatakan tidak valid.



Gambar 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa titik data menyebar di atas, di bawah, atau di sekitar angka 0. Penyebaran tidak membentuk pola bergelombang atau membentuk pola tertentu,

maka dapat dikatakan model regresi tidak ada gejala heteroskedastisitas sehingga model regresi yang baik dapat terpenuhi.

UJI MULTIKOLINIERITAS

Uji multikolinearitas dilakukan guna mengetahui terdapat tidaknya multikolinearitas pada model regresi.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	.411	2.431
X2	.411	2.431

Sumber: Output SPSS, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai VIF untuk setiap variabel independen berada di bawah 10 (2.431), dan nilai tolerance untuk setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 (0.411). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi multikolinieritas dalam model regresi.

UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Analisis regresi berganda yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1 (Constant)	6.051	1.411		4.287	.000	
Insentif Pajak	.309	.100	.308	3.087	.003	
Digitalisasi Pajak	.328	.062	.524	5.257	.000	

Sumber: Output SPSS, 2024

$$Y = 6.051 + 0,309 X1 + 0,328 X2 + e$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta sebesar 6.051 berarti nilai konsisten variabel Penerimaan Pajak adalah sebesar 6.051 jika nilai variabel Insentif Pajak (X1) dan Digitalisasi Pajak (X2) bernilai nol.
2. Koefisien regresi dari variabel Insentif Pajak (X1) sebesar 0.309, yang berarti bahwa setiap adanya peningkatan 1 persen pada nilai variabel Insentif Pajak, maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 0,309.
3. Koefisien regresi dari variabel Digitalisasi Pajak (X2) sebesar 0.328 menyatakan bahwa setiap adanya penambahan 1 persen pada nilai variabel Digitalisasi Pajak dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan maka akan menaikkan variabel Penerimaan Pajak sebesar 0,328.

UJI t

Berdasarkan nilai konstanta dan koefisiensi regresi yang terdapat dalam coefficients(a) hasil

uji data penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari tabel di atas, dapat dilihat dari nilai t hitung (3.087) > t tabel (1.985) variabel Insentif Pajak dengan signifikansi 0,003 < 0,05 dapat diartikan bahwa Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

2. Pada variabel Digitalisasi Pajak diperoleh nilai t hitung (5.257) > t tabel (1.985) dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dapat diartikan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

UJI F

Berikut hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dengan menggunakan program SPSS versi 25:

Tabel 7 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1868.372	2	934.186	75.444	.000b
Residual	1163.957	94	12.383		
Total	3032.330	96			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pajak, Insentif Pajak

Sumber: Output SPSS, 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung diperoleh sebesar 75.444 dan taraf signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dapat diartikan bahwa Insentif Pajak dan Digitalisasi Pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Koefisien determinasi (R square) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan varians dari variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 8 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.785 ^a	.616	.608	3.51888

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pajak, Insentif Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan nilai R square 0,608 yang berarti variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar 60,8% dan sisa 39.2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaruh Insentif Pajak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sebesar 50.3% dengan nilai t hitung (3.087) > t tabel (1.985) variabel Insentif Pajak dengan signifikansi 0,003 < 0,05 dapat diartikan bahwa Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.
2. Pengaruh variabel Digitalisasi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sebesar 57.7% dengan nilai t

hitung (5.257) > t tabel (1.985) dan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dapat diartikan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

3. Pengaruh variabel Insentif Pajak dan Digitalisasi Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sebesar 60.8% dengan nilai Fhitung diperoleh sebesar 75.444 dan taraf signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dapat diartikan bahwa Insentif Pajak dan Digitalisasi Pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444-453. doi:<https://doi.org/10.35145/bilancia.v5i4.1569>
- Harjo, D., Mulya, K. S., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati, . . . Wasesa, T. (2023). *Akuntansi Perpajakan: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hernando, R. A., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi*, 1(2), 119-125. doi:<https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.819.g459>
- Kusumawati, B. F. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral Dan Kebijakan Sunset Policy Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman). *JESP: Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 1-23. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7752>
- Kusumo, B. A. (2022). *Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan di Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press.
- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 5084-5093. Retrieved from <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rakhmindyarto, Sitepu, E. M., Setiawan, H., Riphath, S., Damayanty, S. A., Purwoko, . . . Rachmanto,
- U. N. (2020). *Insentif pajak dan ketahanan fiskal pada masa pandemi covid-19*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rifqi, M., & Ikaningtiyas, M. (2023). Pengaruh Peran Digitalisasi Dan Service Excellent Terhadap Optimalisasi Program Kawasan Lingkungan Sadar Akan Administrasi Kependudukan (KALIMASADA) Di Kelurahan Dukuh Sutorejo Kota Surabaya. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(1), 153-166. doi:<https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.431>